



LAPORAN PENELITIAN

STRATEGI PENETAPAN POLA KEMITRAAN USAHA KOPERASI SESUAI DENGAN SKALA EKONOMI DI JAWA TENGAH (STUDI KASUS DI EKS KARISIDENAN SE JAWA TENGAH)

OLEH :

**R. MULYO HENDARTO
HADI SASANA
EDY RAHARDJA**

DIBIYAI PROYEK PENGKAJIAN DAN PENELITIAN ILMU PENGETAHUAN TERAPAN
DENGAN SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN TANGGAL 20 MEI 1998
NOMOR : 050/P2B/T/DPPM/98/LITMUD/V/1998
DIREKTORAT PEMBINAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
PEBRUARI, 1999**

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Strategi Penetapan Pola Kemitraan Usaha Koperasi Sesuai Dengan Skala Ekonomi di Jawa Tengah (Studi kasus di Eks Karisidenan Se Jawa Tengah)
2. Ketua Peneliti
- a. Nama Lengkap dan Gelar : Drs. R. Mulyo Hendarto, MSP
- b. Jenis Kelamin : Laki - laki
- c. Pangkat / Gol / NIP : Penata / IIIc / 131 754 163
- d. Jabatan Fungsional : Lektor Muda
- e. Fakultas / Jurusan : Ekonomi / IESP
- f. Universitas : Diponegoro
- g. Bidang Ilmu yang diteliti : Ekonomi
3. Anggota Peneliti : 2 (dua) orang
4. Lokasi Penelitian : Daerah Tingkat I Jawa Tengah
5. Jangka Waktu Penelitian : 9 (sembilan) bulan
6. Dibiayai Melalui Proyek : Peningkatan dan Penelitian Ilmu Pengetahuan Terapan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No.050/P2IPT/DPPM/98/LITMUD/V/98
Biaya yang diperlukan : Rp. 4.500.000,-
(Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Semarang, Pebruari 1999



Drs. H. Daryono Rahardjo, MM
NIP 130 327 483

Ketua Peneliti

Drs. R. Mulyo Hendarto, MSP
NIP 131 754 163



Mengetahui
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Diponegoro

Prof. Dr. dr. Satoto
NIP 130 368 071

RINGKASAN

Menghadapi situasi keterbukaan dan globalisasi ekonomi diperlukan perekonomian nasional sebagai satu kesatuan ekonomi yang solid. Untuk itu diperlukan tatahubungan/kemitraan usaha yang serasi dan saling menguntungkan dalam rangka mewujudkan sistem perekonomian yang tangguh berdasarkan demokrasi ekonomi.

Penelitian ini ingin mengetahui model kemitraan usaha yang perlu diterapkan antara koperasi dengan mitra usahanya serta faktor – faktor internal apa saja yang diperlukan oleh koperasi dalam mengadakan kemitraan usaha dengan para mitranya. Penelitian ini dilaksanakan di 5 (lima) Daerah Tingkat II di Jawa Tengah, di masing – masing Dati II diambil sampel koperasi rata – rata dua koperasi produksi. Metode analisa yang dipergunakan adalah analisa SWOT

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa kemitraan usaha telah dijalankan oleh koperasi dengan mitra usahanya tetapi belum optimal, beberapa kendala yang ditemui antara lain : pengusaha/industri besar dan menengah selalu berorientasi untuk mencari keuntungan maksimum sehingga pelaksanaan kemitraan dengan koperasi dikawatirkan akan membebani operasional perusahaannya. Dari sisi koperasi sendiri pada umumnya tingkat profesionalisme dalam berbisnis masih rendah. Kendala lainnya yaitu asas-asas kemitraan saling menguntungkan dan saling membutuhkan belum secara optimal dilaksanakan. Pola kemitraan yang diusulkan antara koperasi dengan mitra usahanya adalah pola sub kontrak dan pola dagang umum dengan model sederhana dan model terintegrasi. Model kemitraan sub kontrak untuk jenis koperasi produksi yang menghasilkan barang setengah jadi, sedangkan pola dagang umum untuk jenis koperasi produksi yang menghasilkan barang jadi.

SUMMARY

The open policy and economic globalization required national economy as one solid unity of economy. Furthermore it needed a harmony in the relation among institution that play the role under the same function each benefits to one another.

This research is run to measure the right model of partnership between cooperative and its partner and to analyze which internal factors needed by the cooperative regarding the partnership relation. The research was held at 5 (five) municipalities in Central Java, which taken two cooperatives in average as samples in each municipality. The analyzing method used is SWOT.

Result of the research shows that partnership has become a general way of doing business but yet not to the term of optimality. Among many difficulties found are: that large and middle industries are taking-advantage oriented of the relation up to maximum rate possible, thus the partnership is seen as more burden towards company responsibilities rather than benefit. In the other side, the professional competency among the cooperative subject are generally insufficient. Other difficulty is that the principles of both benefiting and equality partnership is far from practiced optimally. The scheme of partnership recommended between the cooperative and its partner is a sub-contract and general trading scheme under a simple and integrated model. Sub-contract partnership model is designed for production cooperative which produces half finished goods, while the general trading partnership is aimed for production cooperative which produces finished goods.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmah dan hidayah-Nya sehingga laporan penelitian ini dapat terselesaikan.

Kami mengucapkan terima kasih sebesar - besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian ini mulai dari tahap persiapan hingga penulisan laporan.

Harapan kami, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan serta dapat menjadi bahan masukan bagi seluruh instansi baik pemerintah maupun swasta.

Kami menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu segala kritik dan saran membangun demi kesempurnaan laporan ini sangat kami harapkan. Kami berharap semoga laporan penelitian ini dapat memberikan kegunaan bagi pihak - pihak yang memerlukannya.

Semarang, Pebruari 1999

Tim Peneliti

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel : 1 Perkembangan Koperasi di Indonesia	2
Tabel : 5.1 Keadaan dan Prospek Pemasaran Koperasi Sampel	21
Tabel : 5.2 Potensi Kewirausahaan Pengurus Koperasi Sampel	22
Tabel : 5.3 Potensi Bahan Baku	24
Tabel : 5.4 Potensi Pertumbuhan Koperasi Sampel	25
Tabel : 5.5 Potensi Manajerial dari Sisi Keuangan Pada Koperasi Sampel	26
Tabel : 5.6 Potensi Manajerial dari Aspek Ketenagakerjaan Koperasi Sampel	28
Tabel : 5.7 Potensi Manajerial dari Aspek Organisasi dan administrasi Pada Koperasi Sampel	29
Tabel : 5.8 Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Koperasi Sampel	31
Tabel : 5.9 Kondisi Sosial Ekonomi di Propinsi Sampel	33
Tabel : 5.10 Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya Terhadap Pengembangan Koperasi Menurut Persepsi Pengur.....	34
Tabel : 5.11 Kondisi Sarana dan Prasarana Dalam Pengembangan Koperasi Sampel	35
Tabel : 5.12 Kendala dan Peluang Kemitraan Antara Koperasi Dengan Pengusaha Besar dan Menengah	42
Tabel : 5.13 Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Kendala Pengembangan Koperasi	43

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
SUMMARY	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR ISI	vii
I PENDAHULUAN	1
II TINJAUAN PUSTAKA	6
III TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN	13
IV METODOLOGI PENELITIAN	14
V HASIL DAN PEMBAHASAN	19
VI KESIMPULAN DAN SARAN	51
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam UUD 1945 maupun GBHN 1993 telah menunjuk adanya tiga pelaku dalam perekonomian di Indonesia yaitu badan usaha milik negara (BUMN), koperasi, dan badan usaha milik swasta (BUMS). Dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 tersebut dinyatakan bahwa koperasi adalah bangun perusahaan yang sesuai dengan perekonomian kita yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Disebutkan pula bahwa cabang - cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang seorang.

Karenanya yang ideal dalam perekonomian Indonesia badan koperasi yang disebut - sebut oleh UUD 1945 sebagai yang paling mampu mengejawantahkan perekonomian usaha bersama berasaskan kekeluargaan seharusnya menjadi paling dominan, sementara swasta sebagai pendukung dan BUMN sebagai pengaman. Jika diterjemahkan, lembaga - lembaga koperasi dalam benak penggagas pasal 33 UUD 1945 seharusnya mampu menjalankan usaha - usaha ekonomi besar dari hulu sampai hilir, yang saat ini banyak ditangani swasta, sedangkan swasta hanya menguasai sektor - sektor kecil (Prabowo : Suara Merdeka, 12 Juli 1997).

Kenyataan yang terjadi, selama setengah abad koperasi menjadi soko guru perekonomian rakyat posisinya menjadi sub ordinant sedangkan BUMS menunjukkan kecenderungan semakin dominan, BUMN sendiri cenderung bekerja berdasarkan prinsip - prinsip badan usaha swasta. Meskipun keberadaan dan gaungnya sudah lama berkibar di Indonesia namun ternyata hingga saat ini masih muncul beberapa kekurangan yang perlu dibenahi, sehingga dimasa mendatang akan dijumpai koperasi yang benar - benar profesional dan tangguh.

Berbagai persoalan masih terus mengganjal berkembangnya koperasi. Persoalan klasik seperti kurang profesionalnya pengelolaan, manajemen, kualitas sumber daya manusia, permodalan, operasional dan masalah administratif lainnya pada akhirnya menyebabkan koperasi menjadi sulit berkembang. Kalaupun berkembang, pertumbuhannya tidak secepat pelaku ekonomi lainnya seperti perusahaan - perusahaan swasta maupun BUMN (Susidarto : Media Indonesia, 10 Juli 1997). Perkembangan koperasi di Indonesia sampai dengan tahun 1996 adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Perkembangan Koperasi di Indonesia Tahun 1992, 1994, 1996

Uraian	Perkembangan Koperasi		
	1992	1994	1996
Jumlah Koperasi (Unit)	40.760	44.294	48.391
Anggota (Ribuan Orang)	25.657	25.359	27.170
Nilai Asset (Rp. Milyar)	2.627	4.435	6.577
Volume Usaha (Rp. Milyar)	6.588	8.187	12.354

Sumber : Departemen Koperasi dan PPK

Dalam Munas koperasi di Jakarta tanggal 11 Juli 1997, Presiden Suharto mengatakan bahwa kepincangan ekonomi yang disebabkan oleh tidak meratanya kesempatan berusaha dan kesenjangan pendapatan merupakan salah satu sumber ancaman bagi persatuan dan kesatuan. Salah satu cara untuk mengatasi kesenjangan pendapatan ditengah masyarakat itu adalah dengan mendorong tumbuh dan berkembangnya koperasi sebagai gerakan ekonomi yang bersifat kerakyatan. Untuk itu diperlukan kesungguhan, tekad dan kerja keras, lebih - lebih dalam perkembangan ekonomi yang penuh persaingan dewasa ini.

Melalui koperasi diharapkan tumbuh dan tersalur kesadaran serta kemampuan ekonomi rakyat. Dengan pengelolaan yang lebih profesional, manajemen yang baik dan efisien, dukungan kualitas sumber daya manusia yang bermutu dan berdedikasi tinggi, serta kerjasama saling menguntungkan dengan BUMN maupun BUMS akan membuka peluang makin kukuhnya koperasi di tengah - tengah arus globalisasi.

Menghadapi situasi keterbukaan dan globalisasi ekonomi diperlukan perekonomian nasional sebagai kesatuan ekonomi yang solid. Untuk itu diperlukan tata hubungan / kemitraan usaha yang serasi dan saling menguntungkan diantara ketiga soko guru perekonomian Indonesia : BUMN, koperasi, BUMS nasional dalam rangka mewujudkan sistem perekonomian nasional yang berdasarkan demokrasi ekonomi. Berbagai bentuk kemitraan telah dikembangkan di Indonesia. Ada pola bapak angkat di bidang industri, pola program PIR dan inti plasma di sektor perkebunan, dan yang terakhir yang masih bergaung adalah kemitraan usaha besar dan kecil melalui kelompok Jimbaran. Pada prinsipnya konsep kemitraan apabila berjalan dengan baik sungguh indah yaitu si kuat membantu yang lemah.

Upaya pemerintah dalam memayungi terjadinya tata hubungan / kemitraan usaha diantara ketiga pelaku ekonomi telah dilakukan dengan serangkaian kebijakan, antara lain : pelimpahan saham milik BUMS kepada koperasi, Keputusan Menteri Keuangan No. 316/KMK.016/1994 yang mewajibkan BUMN menyisihkan 1 - 5 persen dari laba perusahaannya untuk dimanfaatkan bagi pembinaan koperasi dan usaha kecil, ketentuan Pakjan 1990 tentang KUK yang menentukan agar bank umum menyalurkan 20 persen dari total kreditnya pada koperasi dan pengusaha kecil, serta kebijakan - kebijakan lainnya.

Mestinya, hubungan kemitraan didasarkan atas dasar " *Win - Win Solution* " artinya kedua belah pihak yang bekerja sama saling membutuhkan, saling percaya dan saling menguntungkan. Realitanya banyak program kemitraan di lingkungan koperasi lebih banyak dipengaruhi oleh faktor " *Political Will* " dari pemerintah, sehingga hanya terkesan memenuhi target yang dibebankan. Hanya sedikit koperasi yang mampu mengembangkan kemitraan usaha berdasarkan prinsip saling melengkapi, saling percaya dan saling menguntungkan.

Dari pola - pola kemitraan nasional yang berjalan selama ini tampaknya tidak semulus yang diharapkan. selama ini ada kesan program kemitraan dilaksanakan setengah hati dan terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Kendala yang dihadapi dalam program kemitraan usaha ini di satu sisi karena faktor internal di tubuh koperasi sendiri yang belum siap bermitra dengan pelaku ekonomi lain, di sisi lain secara eksternal tidak ada kesesuaian dalam pola kemitraan. Dalam pola bapak angkat misalnya PT. Krakatau Steel harus mengurus pengrajin emping mlinjo dan kerajinan tangan, sampai - sampai PT. Krakatau steel mendirikan unit usaha sendiri untuk menangani pembinaan usaha kecil, ini berarti menambah beban operasional perusahaan.

Penyaluran 1 - 5 persen keuntungan BUMN untuk pembinaan usaha kecil dan koperasi tidak berjalan lancar. Kendalanya adalah usaha yang dibina umumnya jauh dari *core competency* BUMN. Kendala lainnya kesulitan menyalurkan dana pada pengusaha kecil dan koperasi yang benar - benar membutuhkan karena persoalan yang dihadapi tidak selalu di bidang permodalan. Selanjutnya walaupun data - data di Bank Indonesia menunjukkan ketentuan - ketentuan penyaluran KUK 20 persen sudah dipenuhi, namun ternyata banyak usaha kecil dan koperasi yang tidak tersentuh oleh perbankan. Hal ini di sebabkan banyak bank lebih suka menyalurkan dana KUK mereka kepada bank - bank kecil atau BPR dari pada koperasi atau pengusaha kecil. Padahal BPR menyalurkan sebagian besar pinjamannya untuk kredit konsumsi.

Pola kemitraan yang didasarkan atas dasar "*win - win solution*" ternyata belum berjalan dengan baik. Disisi lain perbaikan kondisi ekonomi masyarakat juga terasa mendesak dilakukan. Oleh karena itu tidak ada pilihan lain, pemerintah dan para pelaku ekonomi harus serius menjalankan program kemitraan yang substansial dan sistematis.

1.2. Perumusan Masalah

Dari uraian pendahuluan diatas secara umum dapat diketahui bahwa permasalahan utamanya adalah belum optimalnya program kemitraan usaha antara koperasi dengan BUMN maupun MUMS. Secara khusus identifikasi masalah yang akan diteliti lebih lanjut adalah :

1. Pola kemitraan usaha yang bagaimana yang perlu dijalankan antara koperasi dengan industri menengah dan besar.
2. Bagaimana pelaksanaan kerjasama kemitraan antara koperasi dengan mitra usahanya yang selama ini berlangsung.
3. Faktor - faktor internal apa saja yang diperlukan koperasi dalam mengadakan kemitraan usaha dengan industri menengah dan industri skala besar di Jawa Tengah.